

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### A. Kerjasama Antar Daerah

##### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 195 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pentingnya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dimana dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

Dengan memperhatikan efisiensi dan substansi kerjasama tersebut, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergi antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan kerjasama yang telah difasilitasi atau SKPD yang melaksanakan adalah Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

##### a. Kerjasama antar daerah :

- Pemerintah Prov. Kaltim dengan Pemerintah Prov. Jawa Timur
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Sosial Provinsi Kaltim

- Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten PPU
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Berau
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi NTB
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kabupaten Tana Tidung
- Gubernur Lampung dengan Wakil Gubernur Kaltim
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim
- Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati/Walikota se Kalimantan Timur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

b. Kerjasama Antar Pihak Ketiga :

- PT. Migas Mandiri Pratama dengan PT. Amstelco Energy Resources.

## 2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 195 ayat 1 dan 3 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah, Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pentunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antara Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 telah melaksanakan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebanyak 12 kegiatan Bidang Kerjasama sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian.
2. Bidang Perkebunan.
3. Bidang Pertambangan dan Energi.

4. Bidang Kesehatan.
5. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Bidang Pekerjaan Umum.
7. Bidang Perhubungan.
8. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
9. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.
10. Bidang Agama.
11. Bidang Teknologi.
12. Bidang Pelayanan Publik.

### 3. Nama Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Kerjasama Pembangunan Daerah.
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pendirian dan pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur.
6. Pemikiran ilmiah dalam pembangunan di Kalimantan Timur.
7. Pengembangan perkeretaapian khusus untuk transportasi batubara.
8. Keikutsertaan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi.
9. Rencana kepelabuhan Maloy Internasional.
10. Usaha kepemilikan dan pengelolaan participating interest Block Muara Bakau di Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru.

12. Pembangunan 3(tiga) bandara dan sarana pendukung diwilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya".
13. Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur.
14. Pembangunan daerah dalam rangka pengelolaan potensi dan sumber daya.
15. Bidang kebudayaan dan pariwisata.
16. Bidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Dukungan terhadap persiapan kontingen PON XVIII/2012.
18. Pembangunan pertanian tanaman pangan.
19. Pembangunan bandara Long Apung di Kabupaten Malinau dan sarana pendukung lainnya diwilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"
20. Pembangunan bandara Long Bawan di Kabupaten Nunukan dan sarana pendukung lainnya diwilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya".
21. Pembangunan bandara Datah Dawai di Kabupaten Kutai Barat dan sarana pendukung lainnya diwilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya".
22. Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan Timur.
23. Pendampingan penyelenggaraan pendidikan seni dan budaya Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.
24. Pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu di Provinsi Kalimantan Timur.
25. Pelaksanaan transmigrasi.
26. Pengembangan kapasitas penelitian dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan.
27. Pelayanan kesehatan masyarakat warga kota tarakan yang tidak terjangkau dengan program Jamkesmas atau asuransi yang lain.
28. Pengembangan pendidikan Profesi Dokter.
29. Penanganan masalah hukum bidang penataan dan tata usaha negara.

30. Kerjasama pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
31. Kerjasama Pembangunan Daerah.
32. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.
33. Program pembangunan Rice dan Food Estate di Kalimantan Timur.

#### 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Satuan kerja perangkat daerah yang menjadi penyelenggara bidang kerjasama adalah oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran fasilitasi dan pembinaan kerjasama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kab/Kota se-Kaltim sebesar Rp.1.281.795.000 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### 6. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu 1 sampai dengan 5 Tahun

#### 7. Hasil (Output) dari Kerjasama

Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, asset, atau non material berupa keuntungan . Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

#### 8. Permasalahan dan Solusi

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Dan bila kerjasama daerah provinsi

dengan provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota dari Provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat.

## B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

### 1. Mitra yang Diajak Kerjasama

- Kalimantan Rail PTE.LTD dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Utama PT.Pelabuhan IV (Persero).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Konsorsium Bakri Group
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Insani Bara Perkasa
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Inhutani I Pangean, Segah Hulu
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Angkasa Pura I (Persero)
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PTPN XIII.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.ITCI Kayan Hutani
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Kresna Duta Agroindo
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Balikpapan Forest Industries
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Roda Mas Timber
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Bangun Cipta Kontraktor
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Wijaya Sukses Sejahtera
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Anugrah Bara Kaltim
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Jembayan Muara Bara
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Timbang Damai

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Tanito Harum
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Santan Batu Bara
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Indomiko Mandiri
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Perdana Bumi Sariharti
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Perancis Nur
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Rea Kaltim Plantation
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Singlurus Pratama Coal
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Bukit Baiduri Energy
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Turbaindo Coal Mining
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Bara Kumala
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Fajar Surya Swadaya
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Lana Harita Indonesia
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Paula Jaya
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Gunta Samba
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Swakarsa Sinar Sentosa
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.London Sumatera Indonesia
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Gunung Gajah Abadi
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Rimba Karya Rayatama
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Mahakam Sumber Jaya
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Budi Daya Utama



- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Beringin
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Badak NGL
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Waskita Karya
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Kaltim Prima Coal
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Budi Bakti Prima
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Pembangunan Perumahan
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Seroja Universum Narwastu
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Sang Hyang Seri (Persero)
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Menteri Agama Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Zeni Angkatan Darat
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Kristen Indonesia
- Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pusat kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN)
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kaltim

### Bidang Kerjasama :

Perencanaan Pemanfaatan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Kariangau.

- Perjanjian Pelaksanaan untuk Proyek Kerjasama Teknik “Pengembangan Kapasitas untuk Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur” (PN 2001.2496.6) Lampiran Addendum Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### Bidang Kerjasama :

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur (ProBANGKIT).

## 2. Dasar Hukum

Tabel 6.1 Data Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri  
Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

NO.	BIDANG KERJASAMA	BENTUK IKATAN KERJASAMA / JANGKA WAKTU	NOMOR / TANGGAL	PIHAK - PIHAK	INSTANSI YANG TERKAIT
1	2	3	4	5	6
1	Kerjasama Pembangunan Daerah Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama  3 (tiga) Tahun	120..23/73/012/2012  119/022/BKPW.A/2012  Tanggal, 3 Januari 2012	- Pemerintah Provinsi Jatim  - Pemerintah Provinsi Kaltim	- Disperindagkop dan UMMK  - Dinas Pertanian Prov.Kaltim  - Dinas Peternakan Prov.Kaltim  - Dinas Kehutanan Prov.Kaltim  - Dinas Perikanan & Kelautan  - Disnakertrans Prov.Kaltim  - Badan Peberdayaan Perempuan dan KB  - Pertambangan Prov.Kaltim  - Dinas Perhubungan Prov.Kaltim  - Dinas Parawisata Prov.Kaltim

1	2	3	4	5	6
2	Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Perjanjian Kerjasama  5 (lima) Tahun	460/01/102.005/2012  460/06/DS-II/2012  Tanggal, 3 Januari 2012	- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur  - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan  Timur	
3	Kerjasama Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang	Perjanjian Kerjasama  5 (lima) Tahun	120.23/10/211.2/2012  119/010/BPPKB/1/2012  Tanggal, 3 Januari 2012	- Kepala Badan Pemberdayaan  Perempuan dan Keluarga  Berencana Provinsi Jawa Timur  - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur	
4	Pengembangan Penyelenggara-  an Pendidikan, Pelayanan dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan di Prov. Kaltim	Kesepakatan Bersama  4 (empat) Tahun	119/024/BKPW.A/2012  01 Tahun 2012  Tanggal, 4 Januari 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Menteri Agama Republik Indonesia	- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur - Dinas Pendidikan Prov. Kaltim  - Biro Perlengkapan Prov. Kaltim  - Biro Keuangan Prov. Kaltim
5	Pendirian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Kalimantan Timur	Nota Kesepahaman  5 (lima) Tahun	1/I/NK/2012  119/088/BKPW.A/2012  Tanggal, 6 Januari 2012	- Menteri Pendidikan & Kebudayaan - Pemerintah Provinsi Kaltim	- Dinas Pendidikan Prov. Kaltim - Biro Perlengkapan Prov. Kaltim  - Biro Keuangan Prov. Kaltim
6	Pemikiran Ilmiah Institut Teknologi Sepuluh Nopember Dalam Pembangu- nan di Provinsi Kaltim antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.	Nota Kesepahaman  5 (lima) Tahun	119/067/BKPW.A/2012  001/IT.2.IV/KS/2012  Tanggal, 6 Januari 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	- Dinas Pendidikan Prov. Kaltim - Bappeda Prov. Kaltim - Dinas Pertanian Prov. Kaltim  - Badan Diklat Prov. Kaltim  - Dinas PU Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
7	Pengembangan Perkeretapihan Khusus untuk Transportasi Batubara	Nota Kesepahaman 1 (satu) Tahun		- Pemerintah Provinsi Kaltim - Kalimantan Rail PTE. LTD	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Dinas PU Prov. Kaltim - BPPMD Prov. Kaltim
8	Keikutsertaan Pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Kesepakatan Bersama	119/1844/BPPWK.A/2012  Tanggal 10 Januari 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Kukar	- Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim - Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara
9	Rencana Kerjasama Kepelabuhanan Pela - buhan Maloy Internasional, Sangkulirang Provinsi Kalimantan Timur	Nota Kesepahaman  1 (satu) Tahun	119/716/BPPWK.A/2012  6/HK.301/2/DUT-2012  Tanggal 8 Februari 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Direktur Utama PT. Pelabuhan IV (Persero).	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Dinas PU Prov. Kaltim
10	Kerjasama Usaha Dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Participating Interest Blok Muara Bakau di Prov. Kaltim	Kesepakatan Bersama  18 Bulan	MoU-02/MMP-AER/2012  154/AER/II/2012  Tanggal 27 Februari 2012	- PT. Migas Mandiri Pratama - PT. Amstelco Energy Resources	- Dinas Pertambangan Prov. Kaltim
11	Kerjasama Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Kesepakatan Bersama  2 (dua) Tahun	119/1445/BPPWK.A/2012  002/MoU/BCI-NDB/III/12  Tanggal 8 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Konsorsium Bakri Grup	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
12	Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"	Kesepakatan Bersama  2 Tahun	199/1309/BPPWK.A/2012  Kerma/ 1 /III/2012  Tanggal 8 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Biro Pembangunan Daerah Prov. Kaltim
13	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama  1 (satu) Tahun	119/1923/BPPWK.A/2012  Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Kutai Barat	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
14	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1924/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Kutai Timur	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
15	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1925/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab PPU	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
16	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1926/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Berau	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
17	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1927/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Bulungan	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
18	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1928/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Nunukan	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
19	Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/1929/BPPWK.A/2012 Tanggal 19 Maret 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Pemerintah Kab. Tanah Tidung	- Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
20	Kerjasama Pembangunan Daerah  Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	050/153/KESDA  119/3075/BPPWK.A/2012 Tanggal 21 April 2012	- Pemerintah Provinsi NTB  - Pemerintahan Provinsi Kaltim	- Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProv. Kaltim - Dinas Peternakan Prov. Kaltim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kaltim - Dinas Perindustrian, perdagangan, Kopreasi dan UMKM
21	Kerjasama Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Perjanjian Kerjasama 5 (lima) Tahun	415.4/399/Budpar-I/2012  075/274/Budpar-I/2012 Tanggal 21 April 2012	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kaltim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB	

1	2	3	4	5	6
22	Kerjasama Bidang Perternakan dan Kesehatan hewan	Perjanjian Kerjasama 5 (lima) Tahun	188.3/1302/Disnakwan  524.3/521/PKUP/IV2012  Tanggal 21 April 2012	- Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Propinsi NTB  - DinasPeternakan Provinsi Kaltim	
23	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4414/BPPWK.A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Insani Bara Prakasa	- Dinas Pemuda dan OlaragaProv. Kaltim  - Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
24	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4415/BPPWK.A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Inhutani I Pangean, Segah hulu, Pimping	
25	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4416/BPPWK,A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Angkasa Pura I (Persero)	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
26	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4417/BPPWK,A/2012  13.00/MoU/01/IV/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PTPN XIII	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
27	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4418/BPPWK,A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. ITCI Kayan Hutani	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
28	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4419/BPPWK,A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Kresna Duta Agroindo	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
29	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4420/BPPWK,A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Balikpapan Forest Industries	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim
30	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4421/BPPWK,A/2012  Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim  - PT. Roda Mas Timber	- Dinas Pemuda dan Olaraga Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
31	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4422/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2102	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Bangun Cipta Kontraktor	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
32	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4423/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Wijaya Sukses Sejahtera	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
33	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4424/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Anugrah Bara Kaltim	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
34	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4425/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Jembayan Muara Bara	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
35	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4426/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Timbang Damai	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
36	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4427/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Tanito Harum	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
37	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4428/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Santan BatuBara	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
38	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4429/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Indomico Mandiri	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
39	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4430/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Perdana Bumi Sariharti	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
40	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4431/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Perancis Nur	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
41	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4432/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Rea Kaltim Plantation	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
42	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4433/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Singlurus Pratama Coal	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
43	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4434/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Bukit Baiduri Energy	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
44	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4450/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Trubaindo Coal Mining	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
45	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4451/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
46	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/5611/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Bara Kumala	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
47	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/5603/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Fajar Surya Swadaya	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
48	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/5604/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Lana Harita Indonesia	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim



1	2	3	4	5	6
49	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/5605/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Paula Jaya	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
50	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/6203/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Gunta Samba	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
51	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/6204/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Swakarsa Sinar Sentosa	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
52	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/6205/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. London Sumatera Indonesia	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
53	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/4413/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Gunung Gajah Abadi	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
54	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/6320/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Rimba Karya Rayatama	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
55	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/6321/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Mahakam Sumber Jaya	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
56	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3543/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Budi Daya Utama	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
57	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3544/BPPWK,A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Beringin	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
58	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3545/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Badak NGL	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
59	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3546/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Waskita Karya	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
60	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3547/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Kaltim Prima Coal	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
61	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3548/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Budi Bakti Prima	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
62	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/3549/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Pembangunan Perumahan	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
63	Dukungan Terhadap Persiapan Kontigen PON XVIII/2012	Kesepakatan Bersama	119/7152/BPPWK.A/2012 Tanggal 23 April 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Seroja Universum Narwastu	- Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
64	Pembangunan Pertanian Tanam Pangan	Kesepakatan Bersama  1 (satu) Tahun	119/3550/BPPWK.A/V/12  110/SHS.01/MoU/V/2012 Tanggal 3 Mei 2012	- Pemerintahan Provinsi Kaltim - PT. Sang Hyang Seri (Persero)	- Dinas Pertanian Tanam Pangan Prov. Kaltim
65	Pembangunan Bandara Long Apung di Kabupaten Malinau dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"	Perjanjian Kerjasama  2 (dua) Tahun	553.2/001/DISHUB/V/12  PKS/001/V/DITZIAD/12	- Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Direktur Zeni Angkatan Darat	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Biro Pembangunan Daerah Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
66	Pembangunan Bandara Long Bawan di Kabupaten Nunukan dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"	Perjanjian Kerjasama 2 (dua) Tahun	553.2/002/DISHUB/V/12 PKS/002/V/DITZIAD/12	- Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Direktur Zeni Angkatan Darat	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Biro Pembangunan Daerah Prov. Kaltim
67	Pembangunan Bandara Dajah Dawai di Kabupaten Kutai Barat dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Melalui "Operasi Bakti Kartika Jaya"	Perjanjian Kerjasama 2 (dua) Tahun	553.2/003/DISHUB/V/12 PKS/003/V/DITZIAD/12	- Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Direktur Zeni Angkatan Darat	- Dinas Perhubungan Prov. Kaltim  - Biro Pembangunan Daerah Prov. Kaltim
68	Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan Timur	Perjanjian Kerjasama 5 (lima) Tahun	119/4849/B.SOSIAL/VI/12 17/PKS/ITS/2012 Tanggal 14 Juni 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Institut Teknologi Sepuluh Nopember	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim  - Biro Sosial Sekda Prov. Kaltim
69	Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Provinsi Kalimantan Timur	Perjanjian Kerjasama 4 (Empat) Tahun	119/7311/B.SOSIAL/VIII/12 3358/K.14.12.1/PP/2012 Tanggal 4 Juli 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Institut Seni Indonesia Yogyakarta	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim  - Biro Sosial Sekda Prov. Kaltim
70	Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Prov. Kaltim	kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/6949/BPPWK.A/2012 2164/K/14.12.1/PP/2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Institut Seni Indonesia Yogyakarta	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kaltim
71	Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Provinsi Kalimantan Tmur	Kesepakatan Bersama 2 (dua) Tahun	04.KB/05/KA BPH/2012 119/5852/BPPWK.A/2012 Tanggal 5 Juli 2012	- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  - Pemerintah Provinsi Kaltim	- Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
72	Pelaksanaan Transmigrasi	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	G/539/II.05/HK/2011 119/2185/BPPWK.A/2012 Tanggal 8 Juni 2011	- Gubernur Lampung - Wakil Gubernur Kaltim	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
73	Kerjasama Pengembangan Kapasitas  Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan Bersama 2 (dua) Tahun	119/7091/BPPWK.A/2012 02/NK/KL/2012 Tanggal 31 Agustus 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Badan Penelitian dan Pengem- Bagan Kementerian Pekerjaan Umum	- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur
74	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Warga Kota Tarakan yang Tidak Terjangkau dengan Program Jamkesmas atau Asuransi yang lain	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/6319/BPPWK.A/2012 013/MoU/BMD-RS/IV/12 Tanggal 18 Juli 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967	- Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
75	Pengembangan Pendidikan Profesi Dokter	Kesepakatan Bersama 5 (lima) Tahun	119/8682/BPPWK.A/2012 UN/57/12/10.2012 Tanggal 2 Oktober 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Universitas Kristen Indonesia	- Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
76	Penanganan Masalah Hukum Bidang Penataan dan Tata Usaha Negara	Kesepakatan Bersama 2 (dua) Tahun	119/8230/BPPWK.A/2012 B-123/Q.4/Gs.1/10/2012 Tanggal 16 Oktober 2012	- Pemerintah Provinsi Kaltim - Kejaksaan Tinggi Kaltim	- Biro Hukum Sekda Prov. Kaltim
77	Rencana Program Kerjasama Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kab/Kota se Kaltim	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun		- Gubernur Kaltim - Bupati/Wali Kota se Kaltim	- Bappeda Prov. Kaltim

1	2	3	4	5	6
78	Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kaltim	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/34/Otdaksm  119/10345/BPPWK.A/2012  Tanggal 22 Nopember 12	- Pemerintah Provinsi Kaltim  - Pemerintah Provinsi Jawa Barat	- Dinas Pertanian Tanam Pangan Prov. Kaltim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Disnakertrans Prov. Kaltim - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim - Dinas Pertambangan, Energi dan sumberDaya Mineral Prov. Kaltim - Badan Perizinan dan Penanaman Modal Prov. Kaltim - Badan Kearsipan Prov. Kaltim - Badan Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencana Prov. Kaltim - Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim - Dinas Kelautan dan PerikananProv. Kaltim - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim
79	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat	Perjanjian Kerjasama 2 (dua) Tahun	119/096/B.OGR/IX/2012  1239/PIII.1/HKM.II.1  Tanggal 12 November 2012	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara ( PKP 2 A III LAN )	- Biro Organisasi Sekda Prov.Kaltim
80	Pelaksanaan Program Pembangunan Rice dan Food Estate di Kaltim	Kesepakatan Bersama 1 (satu) Tahun	119/10806/BPPWK.A/2012  21.222/MPW-PP/KT/XII/12  Tanggal 6 Desember 2012	- Pemerintah Prov. Kaltim  - Majelis Pimpinan Wilyah Pemuda Pancasila kaltim	- Dinas Pertahanan Tanam Pangan Prov. Kaltim

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga  
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III.

#### 5. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu 1 sampai dengan 5 Tahun

#### 6. Hasil (Output) dari Kerjasama

Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, asset, atau non meterial berupa keuntungan . Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional.

#### 7. Permasalahan dan Solusi

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Dan bila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kab/Kota dalam satu Provinsi atau antara daerah Kab/Kota dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota dari Provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat.

### C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

#### 1. Forum Koordinasi

Kebijakan dan Kegiatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Kebijakan yang harus dilakukan pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan untuk koordinasi adalah :

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.
- Dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.

#### Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/kementerian di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat, misalnya dengan BPKP, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIP Provinsi, pendampingan evaluasi Laporan Program dan Kegiatan serta LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem

pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

## 2. Materi Koordinasi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (e-Procurement), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain.

Sedangkan dalam perolehan dana perimbangan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hampir semuanya terlibat kerjasama dengan instansi vertikal, karena terkait dengan LAKIP, sebagian terkait dengan usulan dana pembantuan,

## 3. Instansi Vertikal yang Terlibat

- a. Kementerian Dalam Negeri
- b. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
- c. Kementerian Luar Negeri
- d. Kementerian Pendidikan
- e. Kementerian Agama
- f. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia



- g. BPK
- h. BPKP
- i. Badan Pusat Statistik
- j. BKKBN
- k. Badan Pertanahan Nasional
- l. Dan lain-lain.

#### 4. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak vertikal sebagaimana tersebut;

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.
- dan banyak lagi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan koordinasi.

#### 5. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Dalam realisasi pelaksanaan koordinasi, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi, pemberian pedoman oleh instansi vertikal, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi oleh instansi vertikal, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pengawasan oleh instansi vertikal.

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilakukan masing-masing Unit Satuan Kerja di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan dengan hampir semua instansi/kementerian di Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan

tugasnya. Misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan lain-lain. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat. Dengan BPKP misalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi dalam hal penyusunan LPPD dan LAKIP Provinsi, pendampingan evaluasi Laporan Program dan Kegiatan SKPD serta LAKIP SKPD, pemutakhiran data barang daerah dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah, pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, penyusunan sistem informasi kinerja, pendampingan penyusunan Program Kerja Pengawasan dan pendampingan evaluasi kinerja dengan Kementerian Dalam Negeri.

#### 6. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan koordinasi antara lain mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai peraturan-peraturan teknis di bawahnya. Bahkan dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan, konsultasi dan koordinasi terus dilakukan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan program pelelangan terbuka berbasis web (e-Procurement), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi vertikal antara lain BAPPENAS, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Menteri Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain.

#### D. Pembinaan Batas Wilayah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbagi  
14 Kabupaten/Kota dan 146 Kecamatan serta 1.475

Desa/kelurahan, masing-masing 4 Kota dan 10 Kabupaten, dari empat Kota tersebut yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Tarakan, sedangkan sepuluh Kabupaten yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Tana Tidung.

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih terdapat permasalahan batas wilayah administrasi yang belum ditegaskan. Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kab/Kota se-Kaltim dan batas wilayah Provinsi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelacakan batas wilayah Provinsi,
  - a. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kaltim dengan Prov. Kalsel pada ruas batas Kab. Paser dengan Kab. Bulungan, Kota Baru dan Tabalong.
  - b. Survey pelacakan batas wilayah Prov. Kaltim dengan Prov. Kalteng pada ruas batas Kab. Kubar dengan Kab. Barito Utara.
- ❖ Pelacakan batas wilayah antar Kab/Kota.
  - a. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Kukar dengan Kota Samarinda
  - b. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Kukar dengan Kota Balikpapan.
  - c. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Kukar dengan Kubar.
  - d. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Paser dengan Kab. PPU.
  - e. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Paser dengan Kab. Kubar.
  - f. Survey pelacakan batas wilayah Kab. PPU dengan Kubar.
  - g. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Kukar dengan Kab. PPU.
  - h. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Berau dengan Kab. Kutim.

- i. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Berau dengan Bulungan.
- j. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Bulungan dengan Malinau
- k. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Nunukan dengan Malinau
- l. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Malinau dengan Kutim
- m. Survey pelacakan batas wilayah Kab. Berau dengan Malinau,

❖ Pemasangan Pilar Batas Utama (PBU)

- a. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalsel.
- b. Pemasangan pilar batas utama Prov. Kaltim dengan Prov. Kalteng.
- c. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Samarinda.
- d. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kota Balikpapan.
- e. Pemasangan pilar batas utama Kab. Paser dengan Kab. Kubar.
- f. Pemasangan pilar batas utama Kab. PPU dengan Kab. Kubar.
- g. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab. Kubar.
- h. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Kutim.
- i. Pemasangan pilar batas utama Kab. Kukar dengan Kab. Kutim.
- j. Pemasangan pilar batas utama Kab. Berau dengan Kab. Bulungan.
- k. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Bulungan.
- l. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Nunukan.

- m. Pemasangan pilar batas utama Kab. Malinau dengan Kab. Kubar

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

Sengketa Batas Wilayah Provinsi

- a. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju.
- b. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong.
- c. Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Sengketa Batas Wilayah antar kabupaten/Kota

- a. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Sepaku dengan Kecamatan Balikpapan Barat.
- b. Kabupaten Paser dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan Babulu.
- c. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
- d. Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dengan Kecamatan Karang dan Kecamatan Sangkulirang.
- e. Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan di ruas batas Kecamatan Sesayap dengan Kecamatan Sembakung.
- f. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda di ruas batas Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sanga-sanga dengan Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Palaran.

- g. Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau diruas batas jalan trans Kalimantan dari pintu gerbang ke arah barat.
- h. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Samboja dengan Kecamatan Balikpapan.
- i. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau dengan Kab. Kubar.
- j. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Kukar dengan Kab. Kutim diruas batas antara Kecamatan Ancalong dengan Kecamatan Kembang Janggut.

## 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

### a. Penyelesaian Batas Kabupaten/ Kota

- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan di ruas batas Kecamatan Sepaku dengan Kecamatan Balikpapan Barat : telah dilakukan pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Kab. PPU dengan Kota Balikpapan yang saat ini tinggal menunggu Keputusan Mendagri.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser di ruas batas Kecamatan Long Kali dengan Kecamatan babulu telah difasilitasi pertemuan rapat koordinasi antara kedua Kabupaten dan telah dilakukan pelacakan lapangan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat desa yang berbatasan, namun Pemerintah Kab. PPU tidak menyetujui.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku : telah difasilitasi pertemuan dan peninjauan lapangan, namun belum ada kesepakatan antara kedua Kabupaten.

- Penyelesaian permasalahan batas antara Kab. Berau dengan Kab Kutim telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi peninjauan lapangan dan kedua Pemerintah Kabupaten menyampaikan kajian teknis tarikan batas dan menyerahkan keputusannya kepada Pemerintah Provinsi dan saat ini Pemerintah Provinsi melakukan kajian teknis.
- Penyelesaian permasalahan batas Kota Samarinda dengan Kab. Kukar telah difasilitasi rapat kajian teknis terhadap PP No.21 Tahun 1987 dimana ruas-ruas batas yang belum ada kesamaan persepsi telah diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi. Ruas batas yang telah diputuskan Pemerintah Provinsi yang bersifat final yaitu ruas batas di Kecamatan Palaran Kelurahan Bentuas dengan Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Handil dan diruas batas Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Bangun Rejo dan Desa Manunggal Jaya dengan Kelurahan Sempaja Utara.
- Penyelesaian permasalahan batas Kota Balikpapan dengan Kab. Kukar telah dikeluarkan penetapan penegasannya oleh Gubernur Kalimantan Timur yang bersifat final.
- Penyelesaian permasalahan batas pertigaan antara Kab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kab. Malinau, Kab. Kubar telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam peninjauan lapangan, namun kondisi geografis yang sangat sulit sehingga belum ada titik batas yang disepakati. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan tim terpadu untuk peninjauan kembali ke lapangan.
- Penyelesaian batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dimana kedua Kabupaten yang berbatasan untuk menyampaikan kajian tarikan batas ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan overlay oleh Tim PBD Provinsi.

- Penyelesaian batas antara Kabupaten Kutim dengan Kabupaten Berau telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi namun kedua Kabupaten masih adanya persepsi tarikan batas.
- Penyelesaian batas Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan menyampaikan tawaran tarikan batas namun kedua Kabupaten menolaknya dan Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan tawaran tarikan batas baru ke Gubernur Kaltim dan tawaran tersebut akan disampaikan ke Kabupaten Tana Tidung.

b. Penyelesaian Batas Provinsi

- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat di ruas batas Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Mamuju : telah disampaikan surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna melakukan penegasan batas di lapangan.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Selatan di ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong : Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengundang Tim PBD Provinsi Kalsel, Tim PBD Kota Baru, dan Tim PBD Kabupaten Tabalong untuk melakukan pelacakan.
- Penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara, : telah dilakukan rapat antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Timur dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Samarinda dan telah disepakati beberapa titik batas oleh kedua pihak.



### 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara pembinaan batas wilayah termasuk salah satu Bagian Perbatasan pada Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

### 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain : Kebakaran, Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, Kecelakaan Transportasi, Epidemi Wabah Penyakit, dan lain-lain. untuk penanganannya / penanggulangannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kab/Kota dengan melibatkan instansi terkait, LSM dan Masyarakat setempat.

### 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)

Bencana untuk wilayah Kalimantan Timur hanya berstatus Nasional, Regional khusus untuk bencana banjir dan DBD (Demam Berdarah) status KLB. Selama tahun 2012. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 197 kejadian yang pada Kab/Kota, terdiri :

➤ Kebakaran	= 103 kejadian
➤ Banjir	= 76 kejadian
➤ Tanah longsor	= 6 kejadian
➤ Angin Topan	= 4 kejadian
➤ Gelombang Pasang	= 1 kejadian
➤ Tenggelam	= 7 kejadian

### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2012, BPBD Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi anggaran melalui APBD Prov. Kaltim sebesar Rp.14.546.940.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.11.979.854.285,- atau 82,35 %.

#### 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana terjadi yaitu;

Dalam mengantisipasi bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yaitu dengan pembuatan Peta Rawan Bencana dan Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana serta pelatihan anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, RAPI dan Masyarakat setempat.

#### 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Diagram di atas dapat dijabarkan sebagai berikut Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana Badan
- b) Sekretaris, membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan Program
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
  - Seksi Pencegahan
  - Seksi Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan :
  - Seksi Penanganan Darurat
  - Seksi Logistik dan Peralatan
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan :
  - Seksi Rehabilitasi
  - Seksi Rekonstruksi

#### 6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi adalah Kebakaran pemukiman penduduk, Kebakaran Hutan/Lahan, Tanah longsor, Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Angin Puting Beliung, DBD, Muntaber.

#### F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka 'Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing & Berkelanjutan' memiliki 7 (tujuh) Kawasan Industri Strategis, yaitu :

1. Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau
  - b. Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau
  - c. Pengembangan Bandar Udara Sepinggian Balikpapan
  - d. Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110 MW
  - e. Pembangunan Waduk Sungai Wain
  - f. Pembangunan Rel Kereta Api Sepanjang 243 Km (Kerjasama dengan JSC Russian Railways)
  - g. Pembangunan Jembatan Pulau Balang
  - h. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Sepanjang 99,02 Km
2. Kawasan Industri dan Jasa, Samarinda, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
  - b. Pembangunan Jalan Akses Menuju Terminal Peti Kemas Palaran
  - c. Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
  - d. Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
  - e. Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda
3. Kawasan Industri Berbasis Migas, Kondesat, Bontang, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5
4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional – Maloy, Kutai Timur, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy
  - b. Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy
  - c. Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI)Maloy
  - d. Pembangunan Jalan Irigasi dan Bendung Kaliorang
  - e. Pembangunan Laut Maloy Sisi Darat
5. Kawasan Industri Pariwisata, Pulau Derawan dan Sekitarnya, Berau, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Bandar Udara Kalimantan Berau
  - b. Pelebaran Jalan Menuju Pulau Derawan
  - c. Pembangunan Jalan di Derawan dan Tanjung Batu

6. Kawasan Delta Kayan Food Estate, Bulungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Pengembangan Rood Estate Seluas 200.000 Hektar
7. Kawasan Perbatasan RI – Malaysia (Kawasan Strategis Nasional), dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman
  - b. Pembangunan Bandar Udara di Kawasan Perbatasan dan Pedalaman

#### G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

##### 1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2012 secara umum Provinsi Kalimantan Timur berada dalam situasi yang kondusif, meskipun di beberapa daerah ada riak-riak kecil yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Kampung Besiq pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 terjadi kerusuhan yang mengarah kepada pertikaian dengan melibatkan 2 suku yang berlatar belakang permasalahan antrian pengisian BBM. Sempat terjadi penjarahan dan pembakaran termasuk SPBU di Muara Lawa, bahkan terjadi pengungsian salah satu etnis. Pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 Bapak Wagub H. Farid Wadjidy bersama Kapolda Kaltim Anas Yusuf, Danrem091/ASN, Anggota DPRD Prov Kaltim Yahya Anja dan Darlis Pattolongi didampingi Kepala Badan Kesbabngpol Prov Kaltim Hasyim Mi'radje serta unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Prov Kaltim Bapak And Mahmud, Abraham Ingan langsung turun ke lokasi. Pada hari Senin, 26 November 2012 berlangsung Rapat sekaligus Ritual Perdamaian antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam "Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Secara Hukum Adat" isinya menyatakan kedua belah pihak bersepakat melakukan perdamaian secara hukum adat untuk mengakhiri pertikaian. Selanjutnya permasalahan hukum diproses di

Samarinda. Situasi dan kondisi berangsur kondusif, masyarakat kembali melakukan aktivitasnya dan pengungsi pulang ke rumah masing-masing.

## 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

- Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kaltim.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.
- Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kaltim.
- Instansi terkait.

## 3. Penanggulangan

Dengan melaksanakan program/kegiatan, antara lain :

- a. Pengembangan wawasan kebangsaan.
- b. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, yaitu pembauran bagi generasi muda, pelajar dan pramuka.
- c. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), yaitu deteksi dini/kewaspadaan dini dan penyuluhan yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman masyarakat tentang rawan bencana dan rawan konflik.

## 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri" berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu Aparat Keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.